

Implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dalam Perlindungan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Siti Nurhayati¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : sitinurhayati@student.uir.ac.id

Abstract

The problem of neglected children is part of the social welfare issue that requires government attention and intervention through the Social Welfare Service Requirement Program (PPKS). This study aims to analyze the implementation of the PPKS Program in handling neglected children at the Pekanbaru City Social Service using Van Metter and Van Horn's policy implementation theory with six indicators: policy standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or dispositions of implementers, inter-organizational communication, and the economic, social, and political environment. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with 7 informants consisting of the Head of the Social Rehabilitation Division, the Head of the Child Rehabilitation and Protection Section, the Head of the Community Institutional Social Empowerment Section, the Staff of the Child Rehabilitation and Protection Section, the PPKS Task Force and the orphanage. The results of the study indicate that the implementation of the PPKS Program has been running and is supported by clear regulations, including the Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2020 concerning Basic Social Rehabilitation for Neglected Children. However, its implementation remains challenging, including limited human resources, limited budget, limited shelter infrastructure, and the social and economic factors of vulnerable communities. Overall, program implementation has shown positive progress, but further optimization is needed to improve the effectiveness of protecting neglected children.

Keywords: Policy implementation, PPKS, neglected children, social services

Abstrak

Permasalahan anak terlantar merupakan bagian dari isu kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian dan intervensi pemerintah melalui Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program PPKS dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan enam indikator: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berjumlah 7 orang terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Staf Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, Satgas PPKS serta pihak panti asuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PPKS telah berjalan dan didukung oleh regulasi yang jelas, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan prasarana rumah singgah, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang rentan. Secara keseluruhan, implementasi program telah menunjukkan arah yang positif, tetapi masih memerlukan optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak terlantar.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, PPKS, anak terlantar, Dinas Sosial

Pendahuluan

Permasalahan anak terlantar merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun dalam realitasnya, tidak semua anak berada dalam kondisi keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Faktor kemiskinan, disfungsi keluarga, kekerasan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan sosial menjadi penyebab munculnya anak-anak yang berada dalam situasi terlantar.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Riau juga tidak terlepas dari permasalahan sosial ini. Perkembangan wilayah perkotaan yang pesat sering kali diiringi dengan kompleksitas masalah sosial, termasuk meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin dan kelompok rentan lainnya. Dalam kondisi demikian, anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi atau persoalan sosial yang berat, anak berpotensi mengalami pengabaian, kurang perhatian, bahkan kehilangan pengasuhan yang layak. Pemerintah melalui Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan tersebut melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Salah satu program yang dijalankan adalah Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang di dalamnya mencakup penanganan terhadap anak terlantar. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, serta pemulihan fungsi sosial bagi individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi terlantar.

Dalam implementasinya, Program PPKS tidak hanya berfokus pada penempatan anak ke panti asuhan, tetapi juga mencakup proses penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial, pendampingan, hingga upaya reunifikasi dengan keluarga apabila memungkinkan. Dengan demikian, program ini tidak sekadar bersifat responsif terhadap laporan masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi anak. Meskipun secara normatif program ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, diketahui bahwa secara kebijakan, program ini telah memiliki payung hukum baik dari pusat maupun daerah. Aparatur pelaksana juga memahami prosedur serta dasar hukum yang menjadi pedoman dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi regulasi dan komitmen pemerintah, terdapat dukungan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan Program PPKS.

Namun demikian, implementasi kebijakan pada praktiknya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung lainnya, seperti sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial masyarakat. Di lapangan, petugas sering kali dihadapkan pada situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan administratif yang tertulis. Misalnya, adanya keluarga yang menolak intervensi pemerintah, atau kondisi anak yang membutuhkan penanganan cepat sementara prosedur administrasi tetap harus dijalankan. Situasi ini menuntut aparaturnya untuk mampu menerapkan kebijakan secara fleksibel dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus anak terlantar menjadi pintu awal bagi Dinas Sosial untuk melakukan intervensi. Namun tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai peran dan fungsi Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar. Sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap pasif atau

kurang responsif terhadap upaya perlindungan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan dukungan internal kelembagaan, tetapi juga dukungan eksternal dari lingkungan sosial.

Dalam konteks kelembagaan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga bekerja sama dengan panti asuhan sebagai mitra dalam proses pengasuhan anak terlantar. Panti asuhan berperan sebagai tempat pengasuhan sementara maupun lanjutan bagi anak yang tidak dapat segera direunifikasi dengan keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengasuh panti, dukungan kebijakan pemerintah dirasakan melalui proses penempatan anak serta adanya pemantauan dari Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan adanya hubungan koordinatif antara pemerintah daerah dan lembaga sosial masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan anak. Meskipun demikian, pelaksanaan Program PPKS masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah singgah. Jumlah staf yang terbatas, khususnya pada Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, menyebabkan beban kerja menjadi cukup tinggi karena harus menangani berbagai kategori PPKS secara bersamaan. Kondisi ini berpengaruh terhadap intensitas pendampingan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program, terutama dalam mendukung kegiatan penjangkauan, asesmen mendalam, serta rehabilitasi sosial yang membutuhkan biaya operasional. Di sisi lain, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rentan berpotensi memunculkan kembali kasus-kasus anak terlantar, sehingga penanganan yang dilakukan sering kali bersifat berulang. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat bagaimana implementasi Program PPKS dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dilaksanakan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Analisis implementasi kebijakan menjadi relevan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program PPKS dalam penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru dengan melihat aspek dukungan kebijakan, sumber daya, koordinasi, serta kondisi sosial masyarakat yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan memahami dinamika implementasi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak terlantar. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan sosial. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi dan mekanisme pelaksanaan Program PPKS, sehingga perlindungan terhadap anak terlantar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Menurut Melawat (2022) Administrasi publik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini membantu kita memahami hubungan tersebut dengan lebih baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik dalam hal efektivitas dan efisiensi selama pelaksanaan. Dalam pengembangan administrasi publik, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau keberlanjutan bidang ini. Faktor lingkungan eksternal, khususnya, memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan administrasi publik.

Administrasi publik secara mendasar melibatkan pengorganisasian kegiatan

pemerintahan untuk melayani masyarakat secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Penulis melihatnya sebagai rangkaian inisiatif pemerintah untuk mengelola sumber daya seperti personel, anggaran, regulasi, atau lembaga dengan tujuan memberikan layanan publik berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menekankan tidak hanya pengembangan kebijakan tetapi juga pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Administrasi publik sangat penting bukan hanya karena peran birokratisnya, tetapi karena memastikan negara menjalankan tugas konstitusionalnya untuk melindungi, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Administrasi ini berfungsi sebagai alat utama dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan seperti anak-anak terlantar. Oleh karena itu, efektivitas administrasi publik mencerminkan kompetensi teknis sekaligus kualitas pemerintahan secara lebih luas.

Konsep Organisasi Publik

Organisasi publik adalah entitas resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan layanan publik, berdasarkan mandat hukum dan kebijakan. Mereka berfungsi sebagai alat negara untuk mengelola kepentingan kolektif, terutama dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk kelompok yang rentan. Peran mereka bersifat administratif dan normatif, mencerminkan nilai-nilai inti seperti keadilan sosial, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

Organisasi publik memiliki ciri khas yang melekat yang membedakannya dari entitas swasta. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menghasilkan keuntungan, melainkan melayani kepentingan masyarakat secara luas. Akibatnya, mereka beroperasi di bawah tekanan ganda: mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemerintah dan memenuhi harapan layanan publik. Oleh karena itu, organisasi publik sering menghadapi dilema di mana mereka harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan dengan kebutuhan untuk berinovasi dalam mengatasi masalah-masalah publik.

Secara praktik, organisasi publik berperan sebagai jembatan antara kebijakan yang dirancang secara politik dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Mereka mengubah kebijakan abstrak menjadi program, kegiatan, dan layanan yang nyata. Proses ini tidak otomatis; melainkan bergantung pada kapasitas, sumber daya, kepemimpinan, budaya organisasi, serta konteks sosial dan politik di mana mereka beroperasi. Selain itu, organisasi publik tidak beroperasi secara terpisah; mereka berinteraksi dengan berbagai aktor lain termasuk masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Kerja sama ini menuntut agar organisasi publik bersikap kooperatif dan transparan, terutama saat menghadapi tantangan sosial yang kompleks dan beragam. Struktur yang tertutup dan hierarkis sering kali sulit beradaptasi dengan lanskap sosial yang terus berkembang.

Konsep Manajemen Publik

Menurut Firdausijah (2023) manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan 3 evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Menurut pandangan Overman, pengelolaan publik dan kebijakan publik adalah dua bidang yang saling terkait dalam administrasi publik. Untuk membedakannya secara jelas, kebijakan publik dapat dilihat sebagai otak dan sistem saraf, sementara manajemen publik diibaratkan sebagai jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Manajemen publik melibatkan mobilisasi sumber daya manusia dan non-manusia berdasarkan pedoman kebijakan publik. Hal

ini berlaku untuk fungsi dan proses manajemen di sektor publik (pemerintah) maupun sektor non-profit di luar pemerintah, sehingga ada yang menyebut manajemen publik sebagai manajemen pelayanan publik (Firdausijah et al. 2023).

Secara kritis, manajemen publik tidak boleh dipandang hanya sebagai alat teknis, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memahami konteks sosial, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan efektif sekaligus berkeadilan sosial.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dalam administrasi publik, yang menentukan apakah sebuah kebijakan mencapai dampak sosial yang diinginkan. Ini bukan sekadar pelaksanaan regulasi yang telah dirancang, tetapi juga serangkaian tindakan yang disengaja melibatkan berbagai pelaku, sumber daya, dan kerangka kelembagaan yang bertujuan mengubah tujuan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Natika dan Rinjani (2022) menyatakan bahwa implementasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga implementasi merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan dari suatu program yang sah pada suatu organisasi dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino 2017:133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan hanya dapat dinilai jika standar dan sasaran kebijakan tersebut realistis dalam konteks sosial-budaya para pelaksana. Ketika langkah-langkah atau tujuan kebijakan terlalu idealis atau utopis sehingga sulit dilaksanakan oleh masyarakat, maka pencapaian kebijakan publik pun menjadi sulit untuk mencapai keberhasilan yang memuaskan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif. Sumber daya manusia sangat penting dalam memastikan keberhasilan, terutama pada tahap-tahap yang membutuhkan keahlian khusus yang sesuai dengan tujuan kebijakan, dan harus dialokasikan secara non-politik. Ketika sumber daya ini kurang memiliki kompetensi dan kemampuan yang diperlukan, pencapaian kinerja kebijakan publik yang efektif menjadi sangat menantang. Selain sumber daya manusia, penting juga mempertimbangkan sumber daya keuangan dan waktu. Bahkan ketika sumber daya manusia yang terampil dan mampu tersedia, kekurangan dana anggaran dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Demikian pula, meskipun ada personel yang berdedikasi dan dana yang memadai, jadwal yang terlalu ketat dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus pada pelaksanaan agen mencakup baik organisasi formal maupun informal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kecocokan agen-agen tersebut. Misalnya, jika sebuah kebijakan bertujuan untuk secara signifikan mengubah perilaku manusia, agen yang terlibat harus menunjukkan pendekatan yang tegas, mantap, dan ketat dalam menegakkan aturan sesuai dengan sanksi hukum. Selain itu, dalam menentukan agen pelaksana, ukuran atau cakupan wilayah pelaksanaan kebijakan harus

dipertimbangkan. Cakupan yang lebih besar membutuhkan keterlibatan lebih banyak agen pelaksana.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana secara signifikan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena kebijakan tersebut tidak dibuat oleh masyarakat setempat, yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah mereka. Sebaliknya, kebijakan tersebut bersifat (*top down*), di mana pengambil keputusan mungkin tidak menyadari atau terputus dari kebutuhan, keinginan, dan masalah warga.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi berfungsi sebagai mekanisme kunci sekaligus syarat mendasar untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ketika pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi dan berkoordinasi secara lebih efektif, kesalahan menjadi kurang mungkin terjadi, dan sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam menilai kinerja pelaksanaan publik melalui sudut pandang Van Metter & Van Horn, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor eksternal memengaruhi keberhasilan. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan eksternal yang negatif dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk melaksanakan kebijakan juga harus fokus memastikan bahwa kondisi eksternal mendukung.

Pendekatan Van Metter dan Van Horn menyoroti bahwa keberhasilan pelaksanaan tidak hanya bergantung pada usaha pelaksana, tetapi juga pada berbagai faktor yang memengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi tujuan kebijakan yang jelas, sumber daya yang cukup, kapasitas dan karakter organisasi pelaksana, sikap pelaksana, koordinasi antar pihak terkait, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam penanganan anak terlantar dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai kondisi aktual pelaksanaan kebijakan, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono dalam (Pasolong 2013:161), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, peneliti adalah sebagai kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu mengenai keadaan lapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh dari penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program PPKS dalam Penanganan Anak Terlantar Berdasarkan Model Van Meter & Van Horn

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, Program PPKS telah memiliki standar dan sasaran yang jelas. Anak terlantar termasuk dalam kategori PPKS yang menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah melalui Dinas Sosial. Dasar hukum program ini telah tersedia baik dari regulasi pusat maupun kebijakan daerah. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyampaikan bahwa secara kebijakan program ini memiliki landasan yang kuat:

"Kalau dari sisi kebijakan, program ini jelas ada dasar hukumnya, baik dari pusat maupun daerah. Anak terlantar memang menjadi perhatian pemerintah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi normatif, standar kebijakan tidak menjadi persoalan. Sasaran program juga telah terdefinisi dengan jelas, yaitu anak-anak yang berada dalam kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Dengan adanya standar yang jelas, aparatur memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, meskipun standar kebijakan telah tersedia, dalam praktiknya sering kali diperlukan penyesuaian dengan kondisi riil di lapangan, terutama ketika menghadapi kasus dengan karakteristik yang berbeda-beda.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi implementasi Program PPKS. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah sumber daya manusia pada Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak masih terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang harus ditangani. Staf pelaksana menyampaikan:

"Kalau dari aturan sebenarnya sudah jelas, tapi memang stafnya terbatas. Sementara kategori PPKS yang ditangani tidak hanya anak terlantar saja."

Anggota Satgas PPKS juga mengungkapkan hal serupa:

"Kendala yang paling terasa itu di jumlah personel. Kadang satu kasus butuh pendampingan intensif, sementara kasus lain juga masuk."

Selain keterbatasan SDM, aspek anggaran dan fasilitas juga menjadi tantangan. Rumah singgah sebagai tempat penanganan sementara memang telah difungsikan, namun kapasitas dan fasilitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam memberikan perlindungan sementara sebelum anak dirujuk atau direunifikasi. Keterbatasan sumber daya ini berdampak pada belum maksimalnya pendampingan berkelanjutan dan monitoring terhadap anak yang telah dirujuk.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dari sisi kelembagaan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Bidang Rehabilitasi Sosial beserta seksi terkait memiliki tanggung jawab langsung dalam penanganan anak terlantar. Koordinasi internal antarbidang dinilai berjalan cukup baik. Namun, karena beban kerja yang tinggi dan keterbatasan personel, pelaksanaan monitoring tidak selalu dapat dilakukan secara rutin. Meskipun demikian, para pelaksana memahami perannya masing-masing, sehingga secara struktural implementasi program tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada.

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan Program PPKS. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak menyatakan:

"Anak terlantar memang jadi perhatian pemerintah, dan ini juga sejalan dengan arahan pimpinan."

Staf pelaksana juga menambahkan:

"Kebijakan itu tetap jadi pegangan kami, walaupun di lapangan kadang harus menyesuaikan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi sikap dan komitmen, pelaksana memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Fleksibilitas dalam menghadapi kasus di lapangan menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial.

5. Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Implementasi Program PPKS tidak hanya melibatkan Dinas Sosial, tetapi juga mitra eksternal seperti panti asuhan. Berdasarkan wawancara dengan pengasuh panti, hubungan koordinasi dengan Dinas Sosial berjalan dengan baik. Ibu pengasuh panti menyampaikan:

"Kalau dari dinas ada perhatian, anak-anak bisa ditempatkan di panti dan tetap dipantau."

Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan lembaga sosial masyarakat. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, kunjungan monitoring belum dilakukan secara intensif dan lebih sering berdasarkan laporan atau kebutuhan tertentu.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi implementasi program. Masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan miskin, sehingga potensi munculnya kembali kasus anak terlantar tetap ada. Dari sisi politik, program ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan sejalan dengan arahan pimpinan. Stabilitas kebijakan ini memberikan kepastian bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Jika dianalisis secara keseluruhan, implementasi Program PPKS dalam penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru dapat dikatakan berjalan cukup baik dari sisi standar kebijakan dan komitmen pelaksana. Kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mendapat dukungan pemerintah daerah. Namun, faktor sumber daya menjadi hambatan yang paling signifikan. Keterbatasan SDM, anggaran, dan fasilitas berdampak pada belum optimalnya pendampingan dan monitoring berkelanjutan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan menjadi tantangan eksternal yang memengaruhi efektivitas program.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya serta dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi koordinasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas Program PPKS ke depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Jika dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sebagian besar indikator menunjukkan kondisi yang mendukung pelaksanaan program, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitasnya.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, Program PPKS telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sasaran yang terdefinisi dengan baik. Aparatur pelaksana memahami pedoman kebijakan dan menjadikannya sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta stabilitas politik juga menjadi faktor pendukung keberlangsungan program. Pada indikator karakteristik agen pelaksana dan disposisi pelaksana, ditemukan bahwa struktur organisasi Dinas Sosial telah memiliki pembagian tugas yang jelas, dan aparatur menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menangani kasus anak terlantar. Sikap responsif dan kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, indikator sumber daya menjadi faktor penghambat utama. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta fasilitas pendukung seperti rumah singgah berdampak pada belum maksimalnya pendampingan dan monitoring berkelanjutan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan mitra eksternal telah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih proaktif dan berkesinambungan.

Faktor eksternal berupa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rentan juga memengaruhi efektivitas program, karena potensi munculnya kembali kasus anak terlantar tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya bergantung pada kesiapan internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sosial. Secara keseluruhan, implementasi Program PPKS dalam penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan cukup baik secara normatif dan struktural, namun memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan koordinasi agar tujuan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.
- Agustino, Leo. 2020. *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Firdausijah, R Taqwaty, Amtai Alaslan, Ahmad Mustanir, Abdurohim Sunariyanto, Rusydi Fauzan, Unggul Sagena, Ade Putra, and Ode Amame. 2023. *MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Helpiastuti, Selfi Budi, Ahmad Farouq, Mulku Zahari, Cinta Mei, Imanuddin Hasbi, Ida Ayu Putu, Sri Widnyani, et al. 2025. *MANAJEMEN PUBLIK*. Penerbit Widina Media Utama. www.freepik.com.
- Melawat, Sitna Hajar. 2022. *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik Pengantar Administrasi Publik*.
- Nurman. 2023. "Teori Administrasi."
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*.
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Yeremia, Andry, Maulana Rifai, Dadan Kurniansyah, Universitas Singaperbangsa Karawang, and Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. 2022. "Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(2).
- Zaini, Ali. 2015. "Teori Kebijakan Publik." *Marpoyan Tujuh Publishing*.

Jurnal

- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6(1): 83. doi:10.29210/3003906000.
- Heryana, Ade. 2018. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>.
- Natika, Luki, and Sri Dewi Rinjani. 2022. *4 Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Subang)*. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>.
- Paramesti, Widyadary, and Sri Yuliani. "Studi Pada Dinas Sosial Kota Surakarta." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 4(1): 2024. <https://surakartakota.bps.go.id/>.
- Sandi, Irwan. 2019. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH."
- Sulistiyono, Firman Othaviana, Aan Efendi, and Al-Khanif. 2025. "Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan." *Constitution Journal*.
- Wahyudin, Muh, and Muh Jamal Jamil. *IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 TENTANG PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN GOWA*.
- Yeremia, Andry, Maulana Rifai, Dadan Kurniansyah, Universitas Singaperbangsa Karawang, and Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. 2022. "Peranan Dinas Sosial Dalam

Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(2).